



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

Nomor : 1191/WKPTUN.W2.TUN1/PW1.1.1/III/2026 Jakarta, 09 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Pengantar Laporan Bulanan
Bulan Februari 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Di -

Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bersama ini kami sampaikan berkas laporan bulanan bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk periode Februari 2026.

Berkas laporan ini sebagai bahan evaluasi dan monitoring guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa. Atas perhatian dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih.



KETUA PTUN JAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HUSBAN



Tembusan :

1. Arsip





**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**



LAPORAN BULANAN FEBRUARI

2026

(021) 22859672

www.ptun-jakarta.go.id

**Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo
Gebang, Jakarta Timur, 13950**



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	17
BAB III. TELAAHAN	25
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	26



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Februari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum



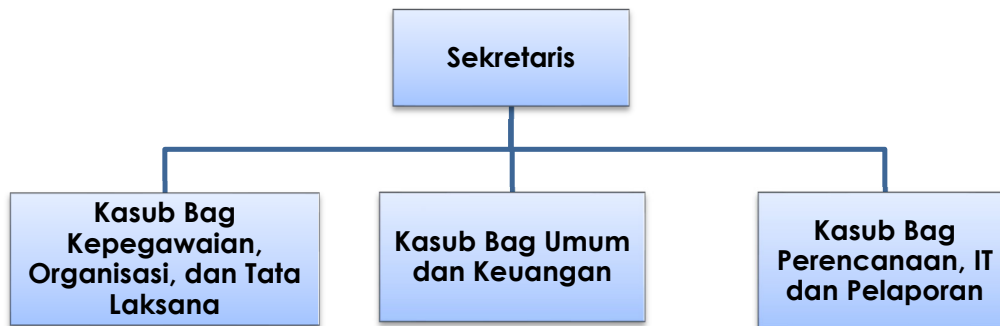
BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprass di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

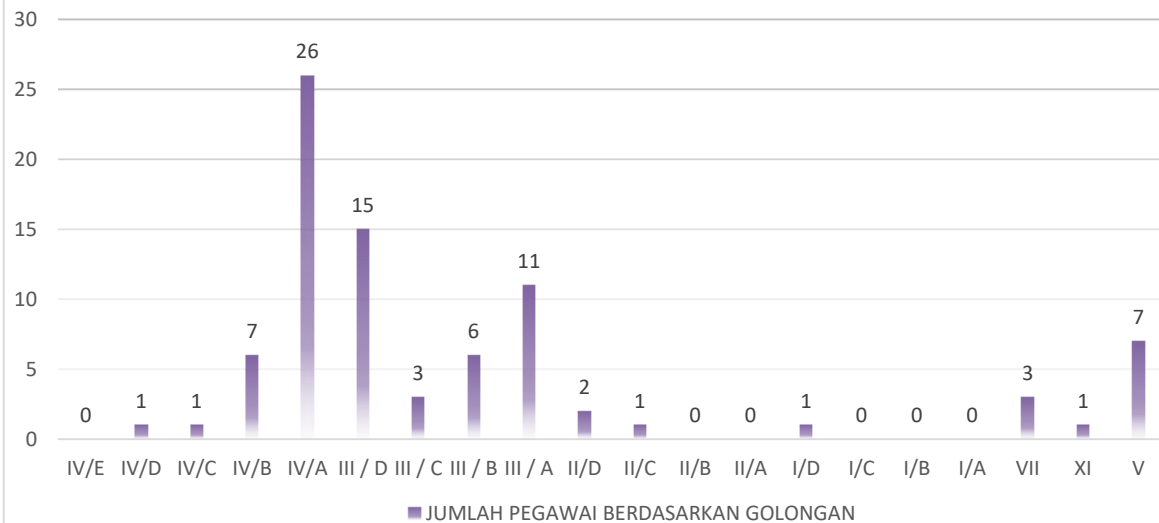
a. Jumlah Pegawai

Jumlah Seluruh Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Januari 2026 adalah 69 orang PNS, 4 orang CPNS, 11 orang PPPK, yang terdiri dari Laki – Laki yang berjumlah 55 orang dan perempuan 29 orang, adapun rincian sebagai berikut:



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.				
2.				

Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	FIRDAUS MUSLIM, S.H, M.H	HAKIM PTUN JAKARTA	HAKIM PTUN MATARAM	TMT 09 FEBRUARI 2026
2.	ARIFUDIN, S.H, M.H	HAKIM PTUN JAKARTA	HAKIM PTUN MAKASSAR	TMT 13 FEBRUARI 2026



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

3.	R.SYUMAN AULIAUROHMAN, S.H, M.H	SEKRETARIS PTUN JAKARTA	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN KOTA BANDUNG	TMT 13 FEBRUARI 2026
----	------------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------

DATA HAKIM / PEGAWAI BARU:

NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	KET

PELANTIKAN / PENGANGKATAN JABATAN BARU

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET

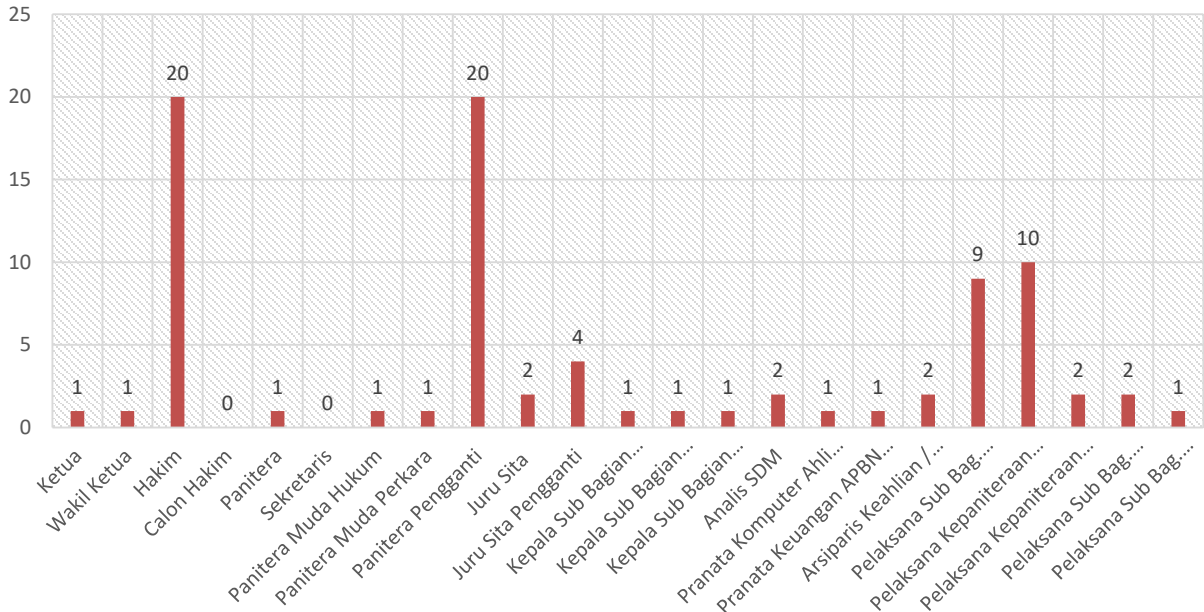
PENSIUN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	SUGENG SISWOYO	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PTUN JAKARTA	TMT 01 FEBRUARI 2026



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Masuk

No.	SUB. BAGIAN	SURAT MASUK				JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	PERSURATAN	MAHKAMAH AGUNG RI	60	-	-	60
2		PTTUN Jakarta	10	-	-	10
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	-	-	-	-
4		DIRJEND. BADIMIL TUN	13	-	-	13
5		KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-
6		PERKARA / LAIN-LAIN	100	-	-	100
7		UMUM / LAIN-LAIN	30	-	-	30
TOTAL						213

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	269	0	0	269
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	40	0	0	40
3	Sub.Perencanaan, TI,dan Pelaporan	5	0	0	5
4	Kepaniteraan Muda Perkara	152	0	0	152
5	Kepaniteraan Muda hukum	20	0	0	20
6	Lain-lain	0	0	0	0
TOTAL					486

2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.

Untuk bulan Februari Tahun 2026 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

No	Nama Barang	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Jumlah
1	A.C. Split	4		28	32
2	Acces Point	5			5
3	Air Conditioning (AC)	18			18
4	Amplifier			3	3
5	Asbak Tinggi			1	1
6	Audio Mixing Console	1			1
7	Bangku Panjang Besi/Metal	7		17	24
8	Bracket Standing Peralatan	8			8
9	Brandkas			1	1
10	Buffet			1	1
11	Buku Lainnya	18			18
12	Camera Conference	1			1
13	Camera Digital	2			2
14	CCTV - Camera Control Television System	26			26
15	Digital LED Running Text	1			1
16	Dispenser	7			7
17	Facsimile	2			2
18	Filing Cabinet Besi	41		1	42
19	Filing Sealing	73			73
20	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	4			4
21	Gedung Pos Jaga Permanen	1			1
22	Genset	1			1
23	Jam Mekanis			6	6
24	Kipas Angin		3		3
25	Komponen/Alat Pengolah Data	26			26
26	Komputer Jaringan Lainnya	29			29
27	Kursi Besi/Metal	606		1	607
28	Kursi Kayu	55		14	69
29	Lambang Garuda Pancasila	6			6
30	Lambang Instansi	7			7
31	Lap Top	9			9
32	Layar Film/Projector	1			1
33	LCD Monitor	1			1
34	LCD Projector/Infocus	1			1
35	Lemari Besi/Metal	17	8	7	32
36	Lemari Kayu	2		22	24
37	Lemari Penyimpan	35			35
38	Loudspeaker	4		5	9
39	Meja Kerja Kayu	173		28	201
40	Meja Komputer			3	3
41	Meja Makan Besi	5			5
42	Meja Rapat	39			39
43	Meja Resepsionis	1		1	2
44	Mesin Absensi	1			1



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

45	Mesin Antrian	2		2
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1		1
47	Microphone	13		13
48	Microphone/Wireless MIC	1		1
49	Mimbar/Podium	1		1
50	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		1
51	Mixer	3		3
52	Mixer Sound Sistem	1		1
53	Modem	1		1
54	Monografi	2		2
55	Movitex Board	1		1
56	Note Book	23		23
57	P.C Unit	42		42
58	Palu Sidang	1	5	6
59	Panggung	2		2
60	Papan Gambar	1		1
61	Papan Pengumuman	6		6
62	Peralatan Komputer Lainnya	2		2
63	Perkakas Kantor Lainnya	10		10
64	Pesawat Telephone	18	24	42
65	Piagam	3		3
66	Piala	12		12
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	10	39
68	Public Address Branch Exchange (PABX)	1		1
69	Rak Besi	134	22	156
70	Rak Server	1		1
71	Router	5		5
72	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen		2	2
73	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		2	4
74	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8		8
75	Sedan	2	1	3
76	Sepeda Motor	7	1	8
77	Server	3		3
78	Sofa	27		27
79	Software Komputer		4	4
80	Sound System	1		1
81	Stempel Timbul/Bulat	1		1
82	Tabung Pemadam Api	9		9
83	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1		1
84	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4		4
85	Tangga Aluminium	1		1
86	Telepon Digital	4		4
87	Televisi		1	1
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1	2
89	Wireless	1		1
90	Workstation	1		1
	Total	1626	20	205
				1851



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

4) Perpustakaan :

Untuk Bulan Februari 2026 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	20,783,935,000	0	4,780,025,730	2,334,992,707	7,115,018,437	34.23 %	13,668,916,563
WA Program Dukungan Manajemen	20,783,935,000	0	4,780,025,730	2,334,992,707	7,115,018,437	34.23 %	13,668,916,563
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
EBB.901 Layanan Sarana Internal	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
003 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
003.0A Pengadaan Meubelair	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
032111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000001. Pengadaan Meja dan Kursi CPNS	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	20,763,935,000	0	4,780,025,730	2,334,992,707	7,115,018,437	34.27 %	13,648,916,563
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	20,763,935,000	0	4,780,025,730	2,334,992,707	7,114,982,437	34.27 %	13,648,932,563
EBA.902 Layanan Umum	1,440,000	0	0	0	0	0.00 %	1,440,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,440,000	0	0	0	0	0.00 %	1,440,000
005.0A Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ekstrakomptabel	1,440,000	0	0	0	0	0.00 %	1,440,000
021252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0	0	0	0	0.00 %	1,440,000
000097. Printer	1,440,000	0	0	0	0	0.00 %	1,440,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	20,762,195,000	0	4,780,025,730	2,334,992,707	7,114,982,437	34.27 %	13,647,212,563
001 Gaji dan Tunjangan	15,725,151,000	0	3,322,465,003	2,194,981,499	5,517,446,502	35.09 %	10,207,704,498
001.0A GAJI DAN TUNJANGAN	15,725,151,000	0	3,322,465,003	2,194,981,499	5,517,446,502	35.09 %	10,207,704,498
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	747,423,000	0	627,099,900	304,824,700	931,924,600	124.69	-184,501,600
000002. Belanja Gaji Pokok PNS	423,548,000	0	627,099,900	304,824,700	931,924,600	220.03	-508,376,600
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
000004. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	323,873,000	0	0	0	0	0.00 %	323,873,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	60,000	0	7,353	3,582	10,935	18.22 %	49,065
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	0	7,353	3,582	10,935	21.87 %	39,065
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
511121 Belanja Tunj. Suamistris PNS	367,458,000	0	48,493,506	23,313,998	71,807,504	19.54 %	295,650,496
000008. Belanja Tunjangan Suamistris PNS	314,964,000	0	48,493,506	23,313,998	71,807,504	22.80 %	243,156,496
000009. Belanja Tunjangan Suamistris PNS (Gaji ke 13)	26,247,000	0	0	0	0	0.00 %	26,247,000
000010. Belanja Tunjangan Suamistris PNS (Gaji ke 14)	26,247,000	0	0	0	0	0.00 %	26,247,000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	118,370,000	0	16,280,260	7,790,992	24,071,252	20.34 %	94,298,748
000011. Belanja Tunjangan Anak PNS	101,460,000	0	16,280,260	7,790,992	24,071,252	23.72 %	77,388,748
000012. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	8,455,000	0	0	0	0	0.00 %	8,455,000
000013. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	8,455,000	0	0	0	0	0.00 %	8,455,000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	43,200,000	0	5,760,000	1,620,000	7,380,000	17.08 %	35,820,000
000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS	37,440,000	0	5,760,000	1,620,000	7,380,000	19.71 %	30,060,000
000015. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	2,880,000	0	0	0	0	0.00 %	2,880,000
000016. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	2,880,000	0	0	0	0	0.00 %	2,880,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	190,337,000	0	26,475,000	13,390,000	39,865,000	20.94 %	150,472,000
000017. Belanja Tunj. Fungsional PNS	163,200,000	0	26,475,000	13,390,000	39,865,000	24.43 %	123,335,000
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	13,600,000	0	0	0	0	0.00 %	13,600,000
000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	13,537,000	0	0	0	0	0.00 %	13,537,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	140,000,000	0	185,670	109,569	295,239	0.21 %	139,704,761
000020. Belanja Tunj. PPh PNS	120,000,000	0	185,670	109,569	295,239	0.25 %	119,704,761
000021. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000022. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	33,530,460	16,077,240	49,607,700	19.26 %	207,917,300
000023. Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	33,530,460	16,077,240	49,607,700	19.26 %	207,917,300
511129 Belanja Uang Makan PNS	889,741,000	0	52,265,000	52,899,000	105,164,000	11.82 %	784,577,000
000024. Gol IV (29 org x 22 hr x 12 Bin)	308,965,000	0	25,707,000	26,363,000	52,070,000	16.85 %	256,895,000
000025. Gol III (60 org x 22 Hr x 12 Bin)	480,730,000	0	22,533,000	23,421,000	45,954,000	9.56 %	434,776,000
000026. Gol II (10 org x 22 Hr x 12 Bin)	90,951,000	0	3,395,000	2,520,000	5,915,000	6.50 %	85,036,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Februari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000027. Gol I (1 org x 22 Hr x 12 Bln)	9,095,000	0	630,000	595,000	1,225,000	13.47 %	7,870,000
511151 Belanja Turjangan Umum PNS	73,654,000	0	5,885,000	2,765,000	8,650,000	11.74 %	65,004,000
000028. Belanja Turjangan Umum PNS	63,845,000	0	5,885,000	2,765,000	8,650,000	13.55 %	55,195,000
000029. Belanja Turjangan Umum PNS (gaji ke 13)	4,902,000	0	0	0	0	0.00 %	4,902,000
000030. Belanja Turjangan Umum PNS (gaji ke 14)	4,907,000	0	0	0	0	0.00 %	4,907,000
511324 Belanja Turj. PPh Pejabat Negara	1,795,717,000	0	408,161,610	320,912,796	729,074,406	40.60 %	1,066,642,594
000031. Belanja Turj. PPh Pejabat Negara	1,208,703,000	0	408,161,610	320,912,796	729,074,406	60.32 %	479,628,594
000032. Belanja Turjangan PPH Pejabat Negara (gaji ke 13)	177,014,000	0	0	0	0	0.00 %	177,014,000
000033. Belanja Turjangan PPH Pejabat Negara (gaji ke 14)	410,000,000	0	0	0	0	0.00 %	410,000,000
511339 Belanja Turjangan Penghasilan Pejabat Negara	10,947,245,000	0	2,021,600,000	1,409,500,000	3,431,100,000	31.34 %	7,516,445,000
000034. Belanja Turjangan Penghasilan Pejabat Negara	8,394,845,000	0	2,021,600,000	1,409,500,000	3,431,100,000	40.87 %	4,963,745,000
000035. Belanja Turjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 13)	531,100,000	0	0	0	0	0.00 %	531,100,000
000036. Belanja Turjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 14)	2,021,600,000	0	0	0	0	0.00 %	2,021,600,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	39,600,000	0	58,901,000	29,450,500	88,351,500	223.11	-48,751,500
000037. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2,859,000	0	0	0	0	0.00 %	2,859,000
000038. Belanja Gaji Pokok PPPK	33,882,000	0	58,901,000	29,450,500	88,351,500	260.70	-54,469,500
000039. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2,859,000	0	0	0	0	0.00 %	2,859,000
511619 Belanja Pembetulan Gaji PPPK	7,000	0	1,840	920	2,760	39.43 %	4,240
000040. Belanja Pembetulan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000041. Belanja Pembetulan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000042. Belanja Pembetulan Gaji PPPK	5,000	0	1,840	920	2,760	55.20 %	2,240
511621 Belanja Turjangan Suamistri PPPK	3,704,000	0	2,719,380	1,359,690	4,079,070	110.13	-375,070
000043. Belanja Turjangan Suamistri PPPK (gaji ke 13)	264,000	0	0	0	0	0.00 %	264,000
000044. Belanja Turjangan Suamistri PPPK	3,176,000	0	2,719,380	1,359,690	4,079,070	128.43	-903,070
000045. Belanja Turjangan Suamistri PPPK (gaji ke 14)	264,000	0	0	0	0	0.00 %	264,000
511622 Belanja Turjangan Anak PPPK	1,456,000	0	630,544	315,272	945,816	64.96 %	510,184

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Februari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000046. Belanja Turjangan Anak PPPK	1,250,000	0	630,544	315,272	945,816	75.67 %	304,184
000047. Belanja Turjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	103,000	0	0	0	0	0.00 %	103,000
000048. Belanja Turjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	103,000	0	0	0	0	0.00 %	103,000
511624 Belanja Turjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0	700,000	350,000	1,050,000	21.43 %	3,850,000
000049. Belanja Turjangan Fungsional PPPK	4,200,000	0	700,000	350,000	1,050,000	25.00 %	3,150,000
000050. Belanja Turjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350,000	0	0	0	0	0.00 %	350,000
000051. Belanja Turjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350,000	0	0	0	0	0.00 %	350,000
511625 Belanja Turjangan Beras PPPK	4,044,000	0	3,186,480	1,593,240	4,779,720	118.19	-735,720
000052. Belanja Turjangan Beras PPPK	3,466,000	0	3,186,480	1,593,240	4,779,720	137.90	-1,313,720
000053. Belanja Turjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	289,000	0	0	0	0	0.00 %	289,000
000054. Belanja Turjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	289,000	0	0	0	0	0.00 %	289,000
511628 Belanja Uang Makan PPPK	100,400,000	0	6,972,000	6,900,000	13,872,000	13.82 %	86,528,000
000055. Belanja Uang Makan PPPK	100,400,000	0	6,972,000	6,900,000	13,872,000	13.82 %	86,528,000
511633 Belanja Turjangan Umum PPPK	10,000	0	3,610,000	1,805,000	5,415,000	54.150	-5,405,000
000056. Belanja Turjangan Umum PPPK	10,000	0	3,610,000	1,805,000	5,415,000	54.150	-5,405,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,037,044,000	0	1,457,560,727	139,975,208	1,597,535,935	31.72 %	3,439,508,065
002.0A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	1,473,862,000	0	1,379,697,700	4,530,882	1,384,228,582	93.92 %	89,633,418
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,393,862,000	0	1,375,479,700	966,700	1,376,446,400	98.75 %	17,415,000
000057. Petugas Kebersihan	654,576,000	0	654,576,000	0	654,576,000	100.00	0
000058. Salpam	720,096,000	0	720,096,000	0	720,096,000	100.00	0
000059. Keperluan sehari-hari Perkantoran	13,190,000	0	807,700	966,700	1,774,400	13.45 %	11,415,600
000101. Galon	6,000,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	80,000,000	0	4,218,000	3,564,182	7,782,182	9.73 %	72,217,818
000060. Biaya perkantoran sehari-hari (91 Org)	80,000,000	0	4,218,000	3,564,182	7,782,182	9.73 %	72,217,818
002.0B LANGGANAN DAYA JASA	939,491,000	0	72,365,568	62,581,966	134,947,534	14.36 %	804,543,466
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	194,000,000	0	326,263	324,531	650,794	0.34 %	193,349,206
000061. Langganan Internet	190,000,000	0	0	0	0	0.00 %	190,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000052. Lisensi Video Conference	4.000.000	0	326.203	324.531	650.794	16,27 %	3.349.206
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.200.000	0	0	859.500	859.500	20,46 %	3.340.500
000063. Biaya Pengiriman Surat Dinas	4.200.000	0	0	859.500	859.500	20,46 %	3.340.500
522111 Belanja Langganan Listrik	706.291.000	0	72.039.305	60.737.035	132.776.340	18,80 %	573.514.660
000064. Belanja Langganan Listrik	706.291.000	0	72.039.305	60.737.035	132.776.340	18,80 %	573.514.660
522112 Belanja Langganan Telepon	6.000.000	0	0	600.900	600.900	11,02 %	5.339.100
000065. Langganan Telephone	6.000.000	0	0	600.900	600.900	11,02 %	5.339.100
522113 Belanja Langganan Air	3.000.000	0	0	0	0	0,00 %	3.000.000
000066. Langganan Air	3.000.000	0	0	0	0	0,00 %	3.000.000
522141 Belanja Sewa	26.000.000	0	0	0	0	0,00 %	26.000.000
000067. Langganan Web Hosting	26.000.000	0	0	0	0	0,00 %	26.000.000
002.0C Pemeliharaan Kantor	1.393.251.000	0	4.747.459	62.992.360	67.739.819	4,86 %	1.325.511.181
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.000.294.000	0	0	7.622.360	7.622.360	0,76 %	992.671.640
000068. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan	1.000.294.000	0	0	7.622.360	7.622.360	0,76 %	992.671.640
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	42.750.000	0	0	2.500.000	2.500.000	5,85 %	40.250.000
000069. Pemeliharaan Rumah Dinas (4 Unit)	42.750.000	0	0	2.500.000	2.500.000	5,85 %	40.250.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350.207.000	0	4.747.459	52.870.000	57.617.459	16,45 %	292.589.541
000070. Pemeliharaan Litt	57.000.000	0	0	44.400.000	44.400.000	77,89 %	12.600.000
000071. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat	19.000.000	0	1.800.000	3.150.000	4.950.000	26,05 %	14.000.000
000072. Pemeliharaan AC Cassete	32.750.000	0	235.000	1.685.000	1.920.000	5,86 %	30.850.000
000073. Pemeliharaan Laptop	15.257.000	0	0	0	0	0,00 %	15.257.000
000074. Pemeliharaan PC	29.820.000	0	0	0	0	0,00 %	29.820.000
000075. Pemeliharaan Printer	19.665.000	0	0	0	0	0,00 %	19.665.000
000076. Pemeliharaan AC Split	36.708.000	0	1.671.359	1.835.000	3.506.359	9,55 %	33.201.641
000077. Pemeliharaan Mesin Pompa	6.982.000	0	0	0	0	0,00 %	6.982.000
000078. Kendaraan Roda 2	13.300.000	0	0	400.000	400.000	3,01 %	12.900.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000079. Kendaraan Roda 4	119.700.000	0	1.041.100	1.400.000	2.441.100	2,04 %	117.258.900
002.0D Operasional Lainnya	203.310.000	0	0	6.630.000	6.630.000	3,26 %	196.680.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	123.750.000	0	0	0	0	0,00 %	123.750.000
000080. Pakaian Dinas Hakim 26 Org x 2 Steil	31.616.000	0	0	0	0	0,00 %	31.616.000
000081. Pakaian Dinas Pegawai 60 Org x 2 Steil	72.960.000	0	0	0	0	0,00 %	72.960.000
000082. Pakaian Dinas CPNS 4 Org x 2 Steil	5.798.000	0	0	0	0	0,00 %	5.798.000
000083. Pakaian Dinas PPPK 11 Org x 2 Steil	13.376.000	0	0	0	0	0,00 %	13.376.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79.500.000	0	0	6.630.000	6.630.000	8,33 %	72.930.000
000084. Honor KPA	21.600.000	0	0	1.800.000	1.800.000	8,33 %	19.800.000
000085. Honor PPK	21.000.000	0	0	1.750.000	1.750.000	8,33 %	19.250.000
000086. Honor Penguj Tagihan Penandatanganan SPM	9.000.000	0	0	750.000	750.000	8,33 %	8.250.000
000087. Honor Bendahara Penerimaan	2.400.000	0	0	200.000	200.000	8,33 %	2.200.000
000088. Honor Bendahara Pengetuaan	7.920.000	0	0	660.000	660.000	8,33 %	7.260.000
000089. Honor Staf Keuangan (2 org x 12 Bln)	11.700.000	0	0	980.000	980.000	8,33 %	10.780.000
000090. Honor PPABP	5.880.000	0	0	490.000	490.000	8,33 %	5.390.000
002.0E HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM	995.280.000	0	0	0	0	0,00 %	995.280.000
522141 Belanja Sewa	995.280.000	0	0	0	0	0,00 %	995.280.000
000091. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (10 Orang x 12 Bln)	995.280.000	0	0	0	0	0,00 %	995.280.000
002.0G Konsultasi ke PusatTingkat Banding	31.850.000	0	750.000	3.240.000	3.990.000	12,53 %	27.860.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.100.000	0	0	3.240.000	3.240.000	12,91 %	21.860.000
000092. Transportasi (2 org x 1 kegiatan)	1.800.000	0	0	0	0	0,00 %	1.800.000
000093. Uang Harian (3 org x 3 hari x 1 kegiatan)	4.950.000	0	0	390.000	390.000	7,88 %	4.560.000
000094. Tiket (2 org x 2 hari x 2 kegiatan)	11.000.000	0	0	0	0	0,00 %	11.000.000
000095. Penginapan (7 org x 1 hari x 1 kegiatan)	7.350.000	0	0	2.850.000	2.850.000	38,78 %	4.500.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.750.000	0	750.000	0	750.000	11,11 %	6.000.000
000096. Perjalanan Dinas Dalam Kota (9 Org x 5 keg) termasuk Konsultasi ke KPPNKANWIL DJPRKPNLKANWIL	6.750.000	0	750.000	0	750.000	11,11 %	6.000.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
DJKNBKBNBKD	6.750.000	0	750.000	0			6.000.000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	0	0	36.000	36.000	12.00 %	264.000
EBD.225 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	36.000	36.000	12.00 %	264.000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	300.000	0	0	36.000	36.000	12.00 %	264.000
005.0A Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	36.000	36.000	12.00 %	264.000
521211 Belanja Bahan	300.000	0	0	36.000	36.000	12.00 %	264.000
000098. Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	36.000	36.000	12.00 %	264.000



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	70,602,000	0	0	0	0	0.00 %	70,602,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	70,602,000	0	0	0	0	0.00 %	70,602,000
BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	70,602,000	0	0	0	0	0.00 %	70,602,000
AEA Koordinasi	19,500,000	0	0	0	0	0.00 %	19,500,000
AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	19,500,000	0	0	0	0	0.00 %	19,500,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	19,500,000	0	0	0	0	0.00 %	19,500,000
005.0A Pelaksanaan Pengamanan Sidang	19,500,000	0	0	0	0	0.00 %	19,500,000
521211 Belanja Bahan	19,500,000	0	0	0	0	0.00 %	19,500,000
000001. Konsumsi Pengamanan Sidang (25 org x25 kali)	19,500,000	0	0	0	0	0.00 %	19,500,000
BCA Perkara Hukum Perseorangan	196,000	0	0	0	0	0.00 %	196,000
BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	196,000	0	0	0	0	0.00 %	196,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	196,000	0	0	0	0	0.00 %	196,000
005.0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	196,000	0	0	0	0	0.00 %	196,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000	0	0	0	0	0.00 %	18,000
000002. Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan	18,000	0	0	0	0	0.00 %	18,000
521211 Belanja Bahan	178,000	0	0	0	0	0.00 %	178,000
000003. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	78,000	0	0	0	0	0.00 %	78,000
000004. Alat Tulis Kantor	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33,216,000	0	0	0	0	0.00 %	33,216,000
QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33,216,000	0	0	0	0	0.00 %	33,216,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	33,216,000	0	0	0	0	0.00 %	33,216,000
005.0A Pos Bantuan Hukum	33,216,000	0	0	0	0	0.00 %	33,216,000
521211 Belanja Bahan	4,416,000	0	0	0	0	0.00 %	4,416,000
000005. ATK Layanan Pos Bantuan Hukum	4,416,000	0	0	0	0	0.00 %	4,416,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	0	0	0	0	0.00 %	28,800,000
000006. Jasa Layanan Konsultan Hukum	28,800,000	0	0	0	0	0.00 %	28,800,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QCA Perkara Hukum Perseorangan	17,690,000	0	0	0	0	0.00 %	17,690,000
QCA.002 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	17,690,000	0	0	0	0	0.00 %	17,690,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	17,690,000	0	0	0	0	0.00 %	17,690,000
005.0A Sidang di luar Gedung Pengadilan	17,690,000	0	0	0	0	0.00 %	17,690,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
000007. Biaya Uang Kebersihan (3 Orang x 1 Kali)	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,390,000	0	0	0	0	0.00 %	17,390,000
000008. Transportasi 7 Org x 1 Keg	2,100,000	0	0	0	0	0.00 %	2,100,000
000009. Tiket 7 Org x 1 Keg	4,636,000	0	0	0	0	0.00 %	4,636,000
000010. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (7 Orang x 1 Malam x 1 Keg)	6,944,000	0	0	0	0	0.00 %	6,944,000
000011. Uang Harian (7 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan)	3,710,000	0	0	0	0	0.00 %	3,710,000



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Februari 2026 agenda rapat meliputi :

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan seluruh Pegawai agar dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara profesional dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman pada KEPPH, Kode Etik Kepaniteraan, Kode Etik ASN dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengungkapkan terima kasih atas komitmen Hakim dan ASN dalam melaksanakan rapat bulanan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk kedisiplinan Hakim dan ASN sudah baik diharapkan untuk kedepannya semakin baik, apabila izin telat masuk kantor maupun izin pulang cepat untuk selalu memakai surat izin.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk kedisiplinan Hakim dan ASN sudah baik diharapkan untuk kedepannya semakin baik, apabila izin telat masuk kantor maupun izin pulang cepat untuk selalu memakai surat izin.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk panita Dewan Kemakmuran Masjid untuk mempersiapkan Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadhan dan dilanjutkan dengan berbuka Bersama.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk Bagian Kepaniteraan dan Bagian Kesekretariatan untuk tertip dalam melaksanakan tugas terutama bagian kepaniteraan dalam penginputan data ke sistem apabila sudah terinput semua harap di screenshot sebagai alat bukti bahwa sudah menginput semua data ke sistem.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

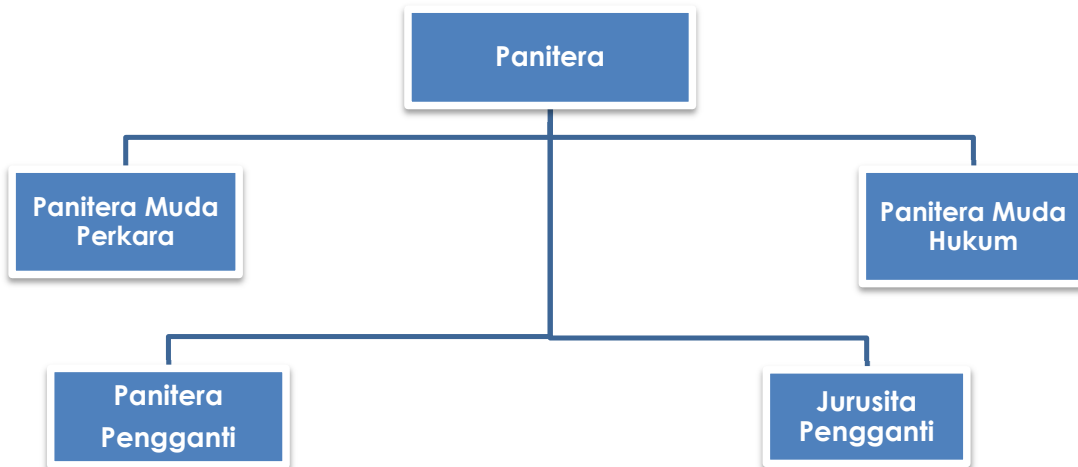
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kepada Juru sita yang dalam masa mangang apabila sudah bagus akan segera diusulkan ke PTTUN Jakarta.
 - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk mengisi LHKPN dan SPT tahunan bagi yang belum mengisi diharapkan untuk secepatnya mengisi LHKPN dan SPT tahunan.
 - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan terkait WBBM akan mengkonfirmasi kembali apakah PTUN Jakarta dapat mengikuti WBBM.
- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.



B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.



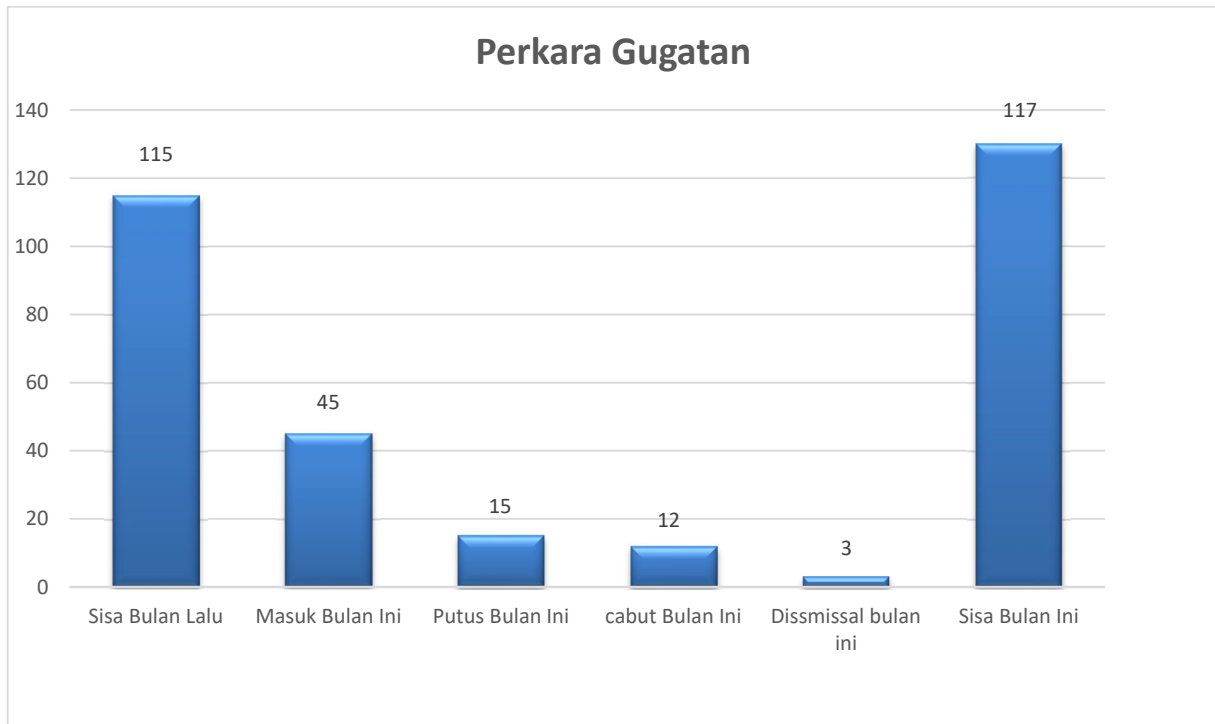
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat jurnal keuangan perkara.
- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2024



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Keadaan Perkara

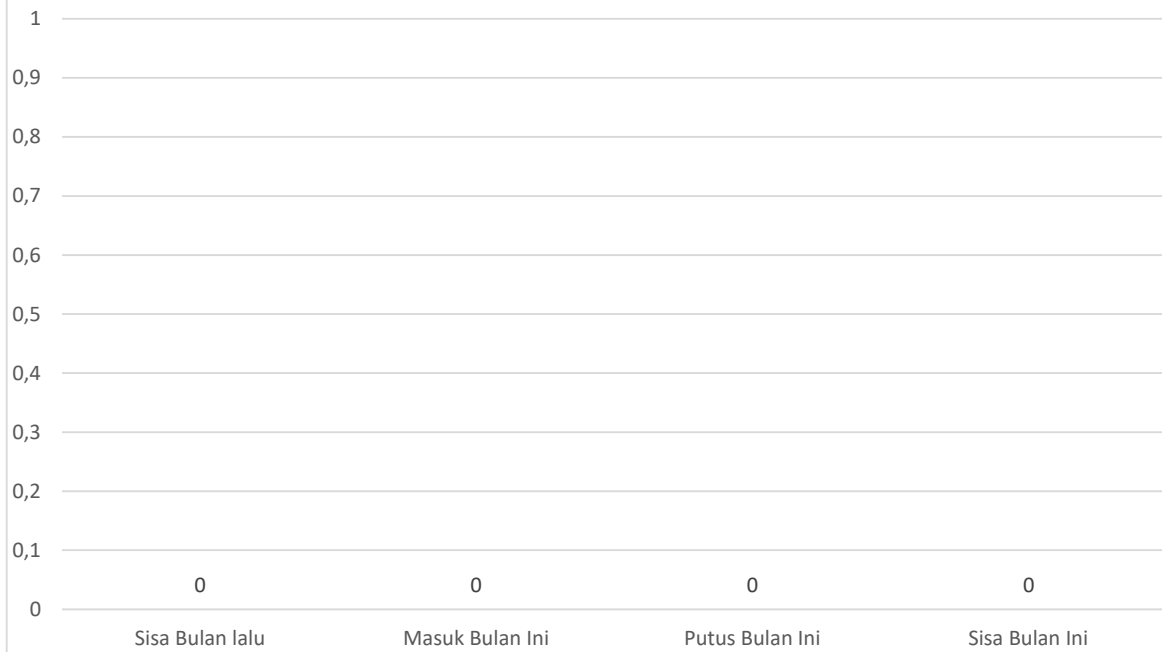


Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)
 $12 + 3 + 15 = 30$ Perkara



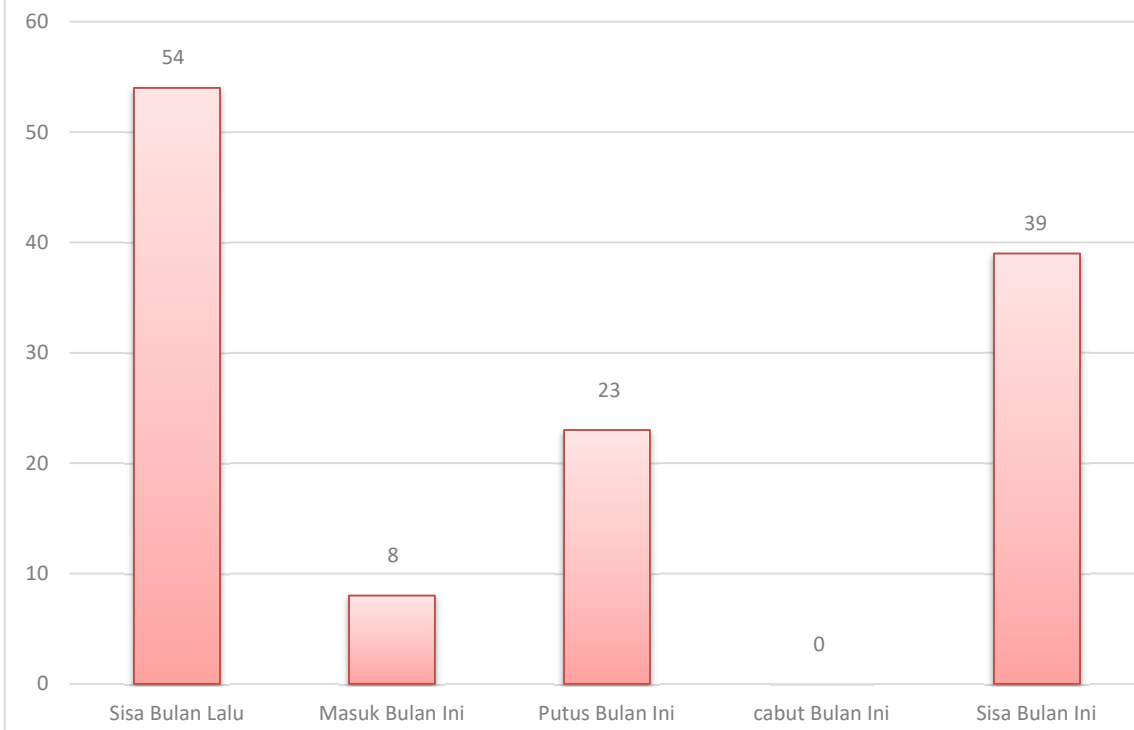
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan

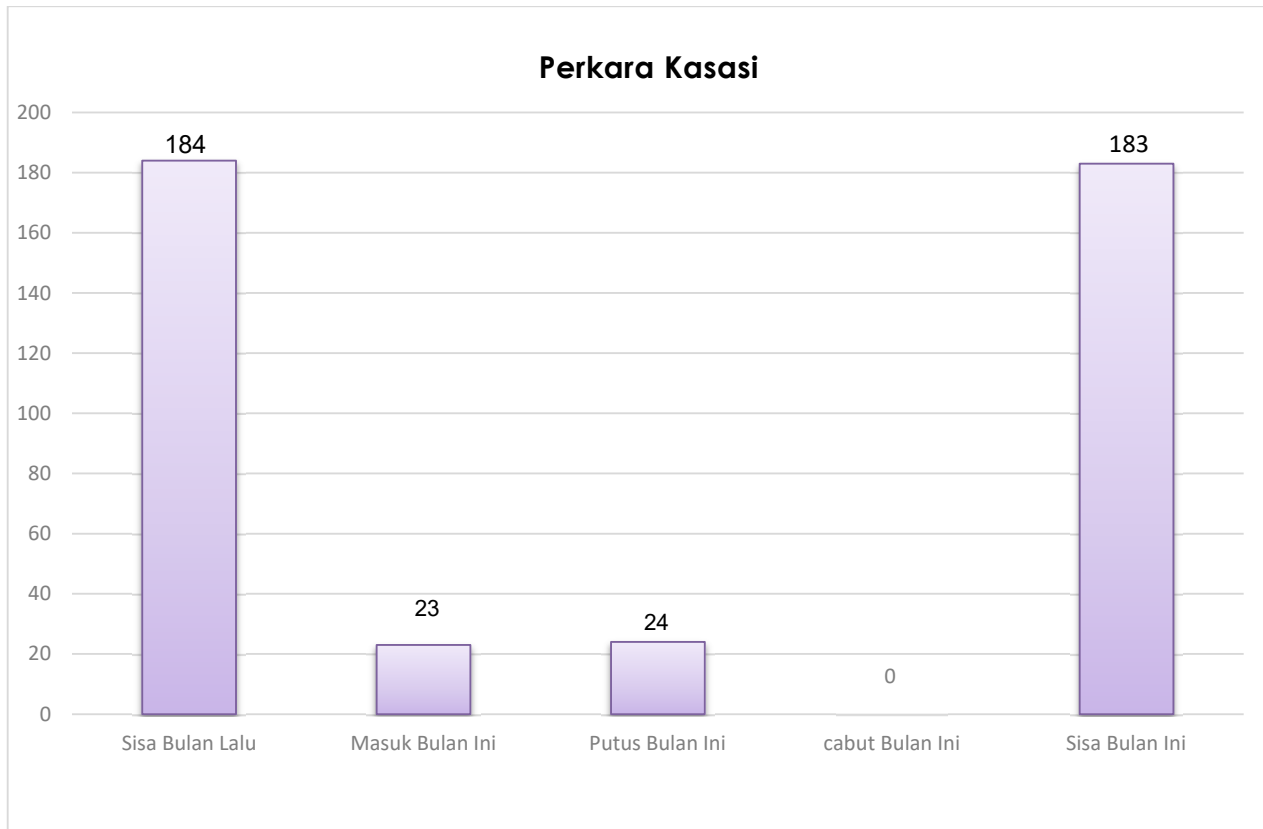


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan Februari 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Perkara		Penggugat		Tergugat		Perlawanan		Putusan						Permohonan		Tema Berkas		Keterangan						
			Masuk	Diadukan	Jumlah	Penerimaan	Putar	Ditolak	Ditunda	Ditolak/Tidak Diketahui	Ditaburkan	Gujar	Diadukan	Trak	Ditaburkan	Jumlah	Sisa Perkara	Bandring	Kasasi	Perinjatan Kembali		Eksekusi	Bandring	Kasasi	Perinjatan Kembali		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	GUGATAN																										
1	Perlawanan		13	5	1	17	4	1	1	4	-	-	-	1	-	-	-	1	16	2	3	1	-	1	5	3	
2	Kepegawaian		7	6	-	13	6	-	5	1	-	-	-	1	-	-	-	1	12	-	-	-	-	2	1	1	
3	Perjinan		6	5	-	11	-	5	5	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	1	2	1	2	3	3	6	
4	Lingkungan Hidup		3	1	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Badan Hukum/ Parpol		22	5	-	27	3	2	5	-	1	-	-	1	1	3	1	7	20	3	9	-	-	7	2	-	
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kepala Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Proses Pemilihan Umum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Penggantian Antar Waktu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
11	Ketenagakerjaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sengketa Informasi Publik/KIP		14	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pengadaan Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Fiktif Positif		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Penyalahgunaan Wewenang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan		17	12	5	24	5	7	7	5	1	-	-	2	-	2	-	5	19	1	3	1	-	2	8	29	
17	Merek		2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	
18	Lain Lain		30	11	-	41	10	1	8	3	1	-	-	1	-	3	1	6	35	1	6	3	-	8	4	1	
	JUMLAH		115	45	6	154	28	17	32	13	3	-	-	6	2	9	4	24	130	8	23	6	2	23	24	30	

MENGETAHUI



Jakarta, 27 Februari 2026
PANITERA,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.
Nip. 197310122000031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Februari 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950, Telp.(021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 27 Februari 2026



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

C. KEGIATAN LAIN – LAIN

1. Kamis, 12 Februari 2026 — Keluarga Besar Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia menyelenggarakan Malam Tasyakuran dalam rangka memperingati 35 Tahun Peradilan Tata Usaha Negara pada Kamis, 12 Februari 2026, bertempat di Auditorium BSDK Megamendung Bogor. Suasana keakraban terasa melalui berbagai penampilan seni dan hiburan dari satuan kerja PERATUN di seluruh Indonesia, yang menjadi wujud kreativitas, solidaritas, dan semangat kebersamaan dalam satu keluarga besar peradilan. Momentum 35 tahun ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Peradilan Tata Usaha Negara untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.



BAB III

TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 73 PNS, dan 11 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 4 (empat) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan Februari 2026 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran Biaya Tambahan untuk Perawatan Gedung dan halaman, PC All in One, serta Meja Kerja.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).

Mengetahui

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Ketua PTUN Jakarta



HUSBAN

Jakarta, 09 Maret 2026

Plt Sekretaris,

Tias Descariasty, S.H.
NIP. 198412092006042002









Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh.• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		













Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		



Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Kompenen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekontruksi.
		
		
		
		
		



Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Kompenen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekontrusi.
		



KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 	2	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 	4	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					



No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					

